

**IMPLEMENTASI PROGRAM *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* (CSR)
PADA PT PLN (PERSERO) UNIT PELAKSANA TRANSMISI BALI
SEBAGAI UPAYA PEMULIHAN EKONOMI PASCA PANDEMI COVID-19
DI DESA WANAGIRI**



Oleh :

Ni Made Maya Gangga Arsani

NIM 2115713083

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI BISNIS
JURUSAN ADMINISTRASI BISNIS
POLITEKNIK NEGERI BALI
BADUNG
2024**

**IMPLEMENTASI PROGRAM *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* (CSR)
PADA PT PLN (PERSERO) UNIT PELAKSANA TRANSMISI BALI
SEBAGAI UPAYA PEMULIHAN EKONOMI PASCA PANDEMI COVID-19
DI DESA WANAGIRI**



POLITEKNIK NEGERI BALI

Oleh :

Ni Made Maya Gangga Arsani

NIM 2115713083

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI BISNIS
JURUSAN ADMINISTRASI BISNIS
POLITEKNIK NEGERI BALI
BADUNG
2024**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA PROJEK AKHIR

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ni Made Maya Gangga Arsani
NIM : 2115713083
Prodi/Jurusan : D3 Administrasi Bisnis / Administrasi Bisnis

Dengan ini menyatakan bahwa naskah Projek Akhir saya dengan judul:

“Implementasi Program Corporate Social Responsibility (CSR) Pada PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Transmisi Bali Sebagai Upaya Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi COVID-19 di Desa Wanagiri”

adalah memang benar asli karya saya. Dengan ini saya juga menyatakan bahwa dalam naskah Projek Akhir ini tidak terdapat karya orang lain yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar di suatu perguruan tinggi, dan atau sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah Projek Akhir ini dan disebutkan pada daftar pustaka.

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia dituntut dan menerima sanksi akademis dalam bentuk apapun.

Badung, 03 September 2024
Yang menyatakan,



NIM. 2115713083

LEMBARAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN




IMPLEMENTASI PROGRAM CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) PADA PT PLN (PERSERO) UNIT PELAKSANA TRANSMISI BALI SEBAGAI UPAYA PEMULIHAN EKONOMI PASCA PANDEMI COVID-19 DI DESA WANAGIRI

Projek Akhir ini diajukan guna memenuhi syarat untuk memperoleh Ijazah
Program Studi Administrasi Bisnis pada Jurusan Administrasi Bisnis
Politeknik Negeri Bali

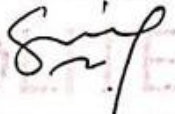
(Ni Made ~~Maya~~ Gangga Arsani)
NIM 2115719083

Badung, 07 Agustus 2024


Disetujui oleh,

Nama Dosen Penguji	Tanda Tangan
Ketua Dosen Penguji, Dr. Phil. I Kadek Dwi Cahaya Putra, S.Pd., M.Sc NIP. 197703052001121001	
Dosen Penguji 1, I Ketut Muderana, SE NIP. 196212311988031012	
Dosen Penguji 2, Drs. I Made Ardana Putra, M.Si NIP. 195909201989031001	

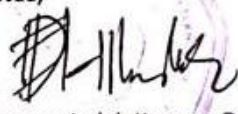
Dosen Pembimbing 1


(Ni Ketut Suciani, S.S. M.Pd)
NIP 197004221998022002


Dosen Pembimbing 2


(Dr. Phil. I Kadek Dwi Cahaya Putra, S.Pd., M.Sc)
NIP 19770305200112001

Disahkan oleh,
Jurusan Administrasi Bisnis
Ketua,


(Nyoman Indah Kusuma Dewi, SE, MBA, Ph.D)
NIP 196409291990032003

Diketahui oleh,
Program Studi Administrasi Bisnis
Ketua,


(I Made Widiastara, S.Psi., M.Si)
NIP 19790218200312100

PRAKATA

Puji Syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Hyang Widhi Wasa atas segala kelimpahan, rahmat serta karunia-Nya yang senantiasa mengiringi perjalanan penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan Judul **“Implementasi Program *Corporate Social Responsibility* Pada PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Transmisi Bali Sebagai Upaya Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi COVID-19 Di Desa Wanagiri”**.

Dalam penyusunan Tugas Akhir ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada beberapa pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan dan dorongan selama proses pembuatan Tugas Akhir maupun penelitian yang penulis lakukan selama penyusunan Tugas Akhir. Oleh karena itu, penulis mengucapkan rasa hormat dan terima kasih terkhususnya kepada :

1. Bapak I Nyoman Abdi, SE., M.eCom selaku Direktur Politeknik Negeri Bali yang telah menyediakan sarana dan fasilitas selama mengikuti perkuliahan di Politeknik Negeri Bali.
2. Ibu Nyoman Indah Kusuma Dewi, SE., MBA, Ph.D. selaku Ketua Jurusan Administrasi Bisnis Politeknik Negeri Bali yang telah memberikan ajaran serta arahan selama mengikuti perkuliahan khususnya di jurusan Administrasi Niaga.

3. Bapak I Made Widiantera, S.Psi., M.Si selaku Ketua Program Studi Diploma III Administrasi Bisnis Politeknik Negeri Bali yang telah memberikan ajaran serta arahan selama mengikuti perkuliahan khususnya di program studi D III Administrasi Bisnis.
4. Ibu Ni Nyoman Teristiyani Winaya, SE.,M.M selaku Koordinator Magang Kerja dan Tugas Akhir Administrasi Bisnis Program Studi Diploma III Administrasi Bisnis Politeknik Negeri Bali yang telah memberikan arahan dan membantu dalam setiap penyusunan tugas akhir.
5. Ibu Ni Ketut Suciani, S.S., M.Pd selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, arahan dan dukungan yang tak gentar selama penulis melakukan penyusunan tugas akhir.
6. Bapak Dr. Phil. I Kadek Dwi Cahaya Putra, S.Pd., M.Sc selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan dan dukungan yang tak henti selama penulis melakukan penyusunan tugas akhir.
7. Bapak Made Gita Mardika selaku Manajer di PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Transmisi Bali yang telah memberikan wewenang untuk melaksanakan Magang Kerja di Perusahaan.
8. Bapak Luky Handianto Adi Pamungkas selaku Asisten Manajer Administrasi, Keuangan dan Umum di PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Transmisi Bali yang telah memberikan izin untuk

melaksanakan Magang Kerja di Perusahaan khususnya di Bagian Administrasi, Keuangan dan Umum.

9. Ibu Kadek Kusmayanti selaku Tim Leader Administrasi dan Umum di PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Transmisi Bali yang telah membimbing dan mengajarkan penulis selama penulis melakukan kegiatan Magang Kerja di Perusahaan.
10. Bapak I Gusti Ngurah Puja Mantrawan selaku Junior Officer Administrasi dan Umum di PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Transmisi Bali yang telah memberikan informasi, data serta bantuan mengenai Program CSR selama penulis melakukan penelitian dan mengumpulkan data untuk keperluan tugas akhir.
11. Kedua orang tua Penulis, Bapak I Ketut Sudiarsa dan Ibu Ni Luh Made Yutrisnani yang senantiasa memberikan dukungan kasih sayang, doa serta materi yang tiada henti kepada penulis.
12. Teman-teman kelas tercinta expose kelas E Program Studi Administrasi Bisnis yang selama ini telah saling merangkul, membantu dan memberikan informasi serta dukungan yang tiada henti untuk penulis, love u all.
13. Teman-teman seperjuangan "Nah ini bray" Arinda, Ririn, Sesis, Wulan yang selama ini selalu berbagi suka dan duka selama mengikuti perkuliahan di Politeknik Negeri Bali secara spontan uhuy.

14. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu mendukung dan memotivasi penulis dalam penyusunan Tugas Akhir ini.

Penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis memohon maaf atas segala kekurangan yang ada, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan guna perbaikan di masa mendatang

Badung, 11 Juli 2024

Penulis

JURUSAN ADMINISTRASI BISNIS
POLITEKNIK NEGERI BALI

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA PROJEK AKHIR	i
LEMBARAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN.....	ii
PRAKATA	iii
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Metode Penelitian.....	8
BAB II.....	13
LANDASAN TEORI.....	13
A. Implementasi.....	13
1. Pengertian Implementasi.....	13
2. Faktor-faktor Implementasi	14
B. <i>Corporate Social Responsibility (CSR)</i>	15
1. Pengertian <i>Corporate Social Responsibility</i>	15
2. Teori <i>Corporate Social Responsibility (CSR)</i>	16
3. Indikator <i>Corporate Social Responsibility (CSR)</i>	18
4. Peranan <i>Corporate Social Responsibility (CSR)</i>	21
5. Tujuan <i>Corporate Social Responsibility (CSR)</i>	23
C. Ekonomi Nasional	23

1. Situasi Ekonomi Nasional Pasca Pandemi <i>COVID-19</i>	23
2. Pemulihan Ekonomi Nasional.....	24
3. Pemulihan Ekonomi Nasional Melalui Program Perusahaan.....	25
BAB III.....	27
GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN.....	27
A. Sejarah Perusahaan	27
1. Sejarah Umum.....	27
2. Sejarah Perusahaan PLN.....	29
3. Profil Perusahaan	30
4. Bidang Usaha	31
5. Struktur Organisasi dan Uraian Jabatan	32
BAB IV	41
HASIL DAN PEMBAHASAN.....	41
A. Kebijakan Perusahaan.....	41
B. Analisis dan Interpretasi Data.....	46
KESIMPULAN DAN SARAN.....	67
A. Kesimpulan.....	67
B. Saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA	69

JURUSAN ADMINISTRASI BISNIS
POLITEKNIK NEGERI BALI

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Logo PT PLN (Persero).....	30
Gambar 3. 2 Struktur Organisasi PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Transmisi Bali	33
Gambar 4. 1 Flowchart Implementasi Program CSR.....	50
Gambar 4. 2 Lembar Evaluasi Penilaian Kelayakan CSR	57
Gambar 4. 3 Lembar Evaluasi Risalah Hasil Survei	59
Gambar 4. 4 Surat Pernyataan Komitmen Bantuan Dana	61
Gambar 4. 5 Dokumentasi Penyerahan Dana Program CSR.....	63



JURUSAN ADMINISTRASI BISNIS
POLITEKNIK NEGERI BALI

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Pertanyaan Wawancara.....	71
Lampiran 2 Dokumentasi Wawancara bersama Bapak Ngurah dengan jabatan Junior Officer Administrasi dan Umum	75
Lampiran 3 Flyer dan Dokumentasi Monitoring Desa Wanagiri.....	76
Lampiran 4 Surat Kesiediaan Membimbing Dosen I.....	78
Lampiran 5 Surat Kesiediaan Membimbing Dosen II.....	79
Lampiran 6 Proses Bimbingan Dosen I.....	80
Lampiran 7 Proses Bimbingan Dosen II.....	81
Lampiran 8 Surat Keterangan Penyelesaian Projek Akhir.....	82
Lampiran 9 Surat Keterangan Penggunaan Karya Mahasiswa.....	83
Lampiran 10 Dokumentasi Penyerahan Hasil Karya Mahasiswa.....	84
Lampiran 11 Luaran/Hasil Karya Mahasiswa Infografis Program CSR	85



JURUSAN ADMINISTRASI BISNIS
POLITEKNIK NEGERI BALI



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam setiap keberhasilan sebuah perusahaan atau bisnis tidak hanya dilihat dari penghasilan, untung maupun rugi yang didapatkan melainkan juga dilihat dari kepekaan di lingkungan eksternal perusahaan yang mungkin akan berdampak baik dan berpengaruh bagi masyarakat maupun perusahaan. Muncul sebuah kesadaran akan pentingnya kerjasama dan dukungan dalam setiap pembangunan berkelanjutan sehingga diperlukan interaksi serta hubungan yang baik dengan masyarakat sekitar, maka dari itu pemberdayaan lingkungan dan masyarakat merupakan hal penting yang harus dilaksanakan oleh masyarakat maupun pemerintah. Pada akhirnya pemerintah

memberikan tanggung jawab sosial kepada setiap perusahaan untuk mendukung adanya pemberdayaan lingkungan dan sosial yang dinamakan sebagai *Corporate Social Responsibility (CSR)*.

Menurut (Mardikanto 2018:92), *Corporate Social Responsibility (CSR)* adalah sebuah konsep dimana perusahaan mengintegrasikan kepedulian sosial dan lingkungan dalam operasi bisnis dan di dalam interaksi dengan para pemangku kepentingan secara sukarela yang mengarah pada keberhasilan bisnis yang keberlanjutan. Sedangkan menurut Rosidah (2018:224), *Corporate Social Responsibility* atau tanggung jawab sosial adalah suatu konsep bahwa organisasi, khususnya selain perusahaan juga memiliki berbagai bentuk tanggung jawab terhadap seluruh pemangku kepentingannya, yang di antaranya adalah konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas dan lingkungan dalam aspek operasional perusahaan yang mencakup aspek ekonomi sosial dan lingkungan. Secara umum dapat disimpulkan *Corporate Social Responsibility* atau CSR merupakan model yang membantu perusahaan untuk menunjukkan tanggung jawab sosialnya kepada diri sendiri, pemangku kepentingan maupun masyarakat dari aspek Pendidikan, ekonomi sosial dan lingkungan. Perusahaan yang menjalankan aktivitas CSR dapat melihat seberapa besar

dampak yang mereka berikan pada masyarakat dari segi ekonomi, sosial maupun lingkungan.

Sesuai dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT) pasal 1 ayat 3 yang dimana dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa *Corporate Social Responsibility* adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas masyarakat dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan/perusahaan maupun masyarakat. Pada umumnya, Konsep CSR di Indonesia telah memperoleh legitimasi hukum untuk dilaksanakan oleh perusahaan swasta maupun badan usaha milik negara (BUMN). Kebijakan CSR merupakan salah satu strategi sah yang digunakan untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat melalui program-program gratis seperti pendidikan maupun pelatihan pengembangan usaha lokal untuk membuka peluang usaha bagi masyarakat.

Sebagai perusahaan yang bergerak pada bidang industri kelistrikan PT PLN menjalankan proses bisnisnya dengan berfokus pada capaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang seimbang dan berkesinambungan melalui pengembangan tiga aspek yang terintegrasi, yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan. Sejalan dengan misi untuk menjadi perusahaan energi yang berwawasan lingkungan, PLN telah mengawal

program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) dalam *Community, Involvement dan Development* (CID) yang juga berbasis SDGs. Sebagai bentuk komitmen dalam pembangunan berkelanjutan dalam melaksanakan Program CSR, PLN menjalankan program CID pilar sosial, ekonomi, dan lingkungan yang juga melibatkan pengembangan komunitas masyarakat demi meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dan lingkungan disekitarnya. Dengan terciptanya program CSR ini dapat mendukung pembangunan berkelanjutan yang dimana PLN akan mendapat dukungan penuh dari masyarakat dalam setiap pembangunan yang dibuat untuk kepentingan bersama seperti tower listrik, gardu induk maupun pembangunan-pembangunan yang berhubungan dengan kelistrikan sehingga masyarakat juga mendapat timbal balik yang positif dengan bisa menggunakan fasilitas yang disediakan PLN setelah mengadakan program CSR.

Pada tahun 2023 PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Transmisi Bali mengimplementasikan Program CSR-nya di Desa Wanagiri. **JL** Desa Wanagiri merupakan salah satu Desa Wisata di Bali yang **EF** saat itu sempat mengalami keterpurukan ekonomi akibat dari Pandemi COVID-19. PT PLN (Persero) UPT Bali memilih Desa Wanagiri karena Desa ini termasuk Desa yang berpotensi untuk dijadikan tempat Desa Wisata karena memiliki nama yang cukup

terkenal bagi para wisatawan yang ingin berkunjung, selain itu Desa Wanagiri juga memiliki keindahan alamnya sendiri yaitu Danau Tamblingan dan Danau Buyan, di kedua Danau tersebut biasa dijadikan destinasi wisata dan memiliki potensi yang bagus untuk dikembangkan sebagai objek wisata. Selain karena Pandemi COVID-19 PT PLN (Persero) UPT Bali memilih Desa Wanagiri karena berhubungan dengan tema program TJSL PLN saat itu yaitu Ekowisata yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat, mengentaskan kemiskinan, menyerap tenaga kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar, karena Sesuai dengan UU Nomor 6/2014 tentang Desa dapat mencapai tujuan utamanya : “mengurangi kemiskinan, mengurangi kesenjangan desa-kota, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di pedesaan”.

Untuk mengatasi permasalahan urbanisasi dan belum adanya pemanfaatan sumber daya alam yang baik di Desa Wanagiri PT PLN (Persero) UPT Bali melalui Program CSR-nya mendukung program pemerintah untuk pemberdayaan masyarakat dan lingkungan melalui pengembangan Desa Wisata Wanagiri di Kabupaten Buleleng Bali. Sehingga dilihat dari penjelasan dan pernyataan diatas merupakan salah satu motivasi bagi penulis sehingga penulis memilih judul

“Implementasi Program *Corporate Social Responsibility* Pada PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Transmisi Bali Sebagai Upaya Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi COVID-19 Di Desa Wanagiri.”

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan oleh penulis, pokok masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimanakah Implementasi dari Program *Corporate Social Responsibility* (CSR) pada PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Transmisi Bali Dalam Upaya Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi COVID-19 Di Desa Wanagiri?
2. Apakah hambatan dan solusi yang dirasakan dan didapatkan PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Transmisi Bali Dalam Upaya Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi COVID-19 Di Desa Wanagiri?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini :

1. Untuk mengetahui deskripsi pengimplementasian dari Program *Corporate Social Responsibility* (CSR) pada PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Transmisi Bali.
2. Untuk mengetahui hambatan dan solusi yang dirasakan dan didapatkan PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Transmisi Bali

Dalam Upaya Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi COVID-19
Di Desa Wanagiri.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Mahasiswa

Mahasiswa dapat mendalami konsep, teori dan praktik CSR secara lebih mendalam melalui penelitian ini, membantu meningkatkan pemahaman mereka tentang tanggung jawab sosial perusahaan, dampak terhadap masyarakat dan lingkungan.

2. Bagi Politeknik Negeri Bali

Penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai bahan informasi maupun referensi dalam upaya menambah pengetahuan bagi pembaca di lingkungan Politeknik Negeri Bali.

3. Bagi Perusahaan

Penelitian ini sebagai masukan bagi PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Transmisi Bali dalam meningkatkan citra perusahaan serta menjadi bahan evaluasi dari program yang dikerjakan.

JURUSAN ADMINISTRASI BISNIS
POLITEKNIK NEGERI BALI

E. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penulis melakukan Magang Kerja. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Transmisi Bali.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian yang dapat diambil yaitu Implementasi Program *Corporate Social Responsibility* (CSR) pada PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Transmisi Bali Dalam Upaya Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi COVID-19 Di Desa Wanagiri.

3. Data Penelitian

a. Jenis Data

Jenis data ada 2 yaitu data kuantitatif dan kualitatif. Data kualitatif merupakan metode penelitian berupa narasi maupun penjelasan yang berdasar pada filsafat positivisme yang bertujuan untuk menggambarkan dan menguji hipotesis yang dibuat oleh peneliti (Sugiyono 2018:15). Sedangkan data kuantitatif merupakan metode penelitian berupa angka-angka yang akan diukur menggunakan statistik sebagai alat uji perhitungan, berkaitan dengan masalah yang diteliti untuk menghasilkan suatu kesimpulan (Sugiyono 2018:13).

Maka dari itu, Jenis data yang digunakan oleh penulis untuk penelitian ini adalah jenis data kualitatif.

b. Sumber Data

1) Data Primer

Menurut Sunyoto (2015:21) "Data primer adalah data asli yang dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab masalah penelitiannya secara khusus". Data dikumpulkan sendiri oleh penulis langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan. Data primer yang digunakan oleh penulis adalah hasil wawancara dan hasil survei yang didapatkan dari perusahaan selama melaksanakan magang kerja dengan mengambil data yang berhubungan dengan topik penelitian.

2) Data Sekunder

Menurut Sunyoto (2015:21), "Data sekunder adalah data yang bersumber dari catatan yang ada pada perusahaan dan dari sumber lainnya". Data sekunder dikumpulkan sendiri oleh penulis dan diperoleh dari berbagai sumber seperti buku-buku, laporan, jurnal dan artikel sebagai penunjang penelitian ini.

c. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2017:194) cara atau teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan interview (wawancara), kuisisioner (angket), observasi (pengamatan) dan gabungan ketiganya.

1) Wawancara

Menurut Sugiyono (2017:194) wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melaksanakan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang akan diteliti dan apabila peneliti juga ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah dari responden tersebut sedikit.

2) Kuesioner

Menurut Sekaran dan Bougie (2017:170) Kuesioner adalah daftar pertanyaan tertulis yang telah dirumuskan sebelumnya dimana responden akan mencatat jawaban mereka dan biasanya dalam alternatif yang didefinisikan dengan jelas.

Pada penelitian ini kuesioner diberikan kepada 8 karyawan untuk mengetahui metode pemberian kompensasi, mengetahui apakah terdapat

ketidakadilan dalam pemberian kompensasi dan mengetahui hal lainnya untuk melakukan analisis jabatan.

3) Observasi

Menurut Sugiyono (2017:203) Observasi sebagai teknik pengumpulan data yang mempunyai ciri spesifik bila dibandingkan dengan teknik lainnya.

Observasi dilakukan dengan melihat langsung di lapangan misalnya kondisi ruang kerja dan lingkungan kerja yang dapat digunakan untuk menentukan faktor layak yang di dukung dengan adanya wawancara dan kuesioner mengenai analisis jabatan.

4) Metode Analisis Data

Menurut Sugiyono (2020:131) analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara

mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola serta memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan

membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Maka dari itu Penulis dalam melakukan penelitian memutuskan untuk menggunakan metode penelitian kualitatif bersifat deskriptif yang artinya dalam bentuk pembahasan serta menjelaskan program CSR yang diimplementasikan oleh PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Transmisi Bali sebagai upaya pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19 dengan menguraikan data berupa kata-kata, gambar dan bukan angka-angka.



JURUSAN ADMINISTRASI BISNIS
POLITEKNIK NEGERI BALI



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Implementasi

1. Pengertian Implementasi

Terdapat berbagai pendapat para ahli dan akademisi yang mengemukakan tentang pengertian dari implementasi. Dalam hal ini perlu dijelaskan kembali agar pemahaman tentang implementasi dapat disinkronisasikan dari konsep penelitian terhadap suatu kebijakan maupun perundang-undangan.

Menurut Mulyadi (2015:12) mengenai implementasi adalah suatu tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta berusaha mencapai perubahan-perubahan besar atau kecil

sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya, karena pada hakikatnya Implementasi juga merupakan upaya pemahaman apa yang seharusnya terjadi setelah program dilaksanakan.

Sedangkan menurut Setiawan (2015:14) Implementasi merupakan perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya, serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif.

Berdasarkan pendapat di atas dapat diketahui bahwa pengertian implementasi merupakan suatu proses atau perluasan aktivitas yang berkaitan dengan kebijakan dan program-program yang akan diterapkan oleh suatu organisasi atau institusi yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan, khususnya yang berkaitan dengan institusi negara.

2. Faktor-faktor Implementasi

Menurut Purwanto (Syahida, 2014:13), beberapa faktor yang menentukan berhasil atau tidaknya suatu proses implementasi

yaitu :

- a. Kualitas kebijakan itu sendiri.
- b. Kecukupan input kebijakan (terutama anggaran).
- c. Ketepatan instrument yang dipakai untuk mencapai tujuan kebijakan (pelayanan, subsidi, hibah dan lainnya)

- d. Kapasitas implementor (struktur organisasi, dukungan SDM, koordinasi, pengawasan dan sebagainya)
- e. Karakteristik dan dukungan kelompok sasaran (apakah kelompok sasaran adalah individu atau kelompok, laki-laki atau Perempuan terdidik atau tidak)
- f. Kondisi lingkungan geografi, sosial, ekonomi dan politik dimana implementasi tersebut dilakukan.

B. Corporate Social Responsibility (CSR)

1. Pengertian Corporate Social Responsibility

Menurut Rosidah (2018:224), "*Corporate Social Responsibility* atau tanggung jawab sosial adalah suatu konsep bahwa organisasi, khususnya perusahaan yang memiliki berbagai tanggung jawab terhadap seluruh pemangku kepentingannya, yang di antaranya adalah konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan yang mencakup aspek ekonomi sosial dan lingkungan".

Selanjutnya menurut Mardikanto (2018:92), "*Corporate Social Responsibility* (CSR) adalah sebuah konsep dimana perusahaan mengintegrasikan kepedulian sosial dan lingkungan dalam operasi bisnis dan di dalam interaksi dengan para pemangku kepentingan secara sukarela yang mengarah pada keberhasilan bisnis yang berkelanjutan".

Selanjutnya menurut Prasetyo dan Meiranto (2017) “CSR merupakan suatu konsep bahwa organisasi, dalam hal ini lebih dispeksifikkan kepada perusahaan, memiliki sebuah tanggung jawab terhadap konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan”.

Dari berbagai pendapat para ahli dan akademisi yang mengemukakan tentang *Corporate Social Responsibility* atau tanggung jawab sosial adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh perusahaan sebagai rasa tanggung jawab perusahaan terhadap dampak yang ditimbulkan oleh operasional perusahaan terhadap sosial maupun lingkungan sekitar dimana perusahaan itu berada.

2. Teori *Corporate Social Responsibility* (CSR)

Terdapat dua teori yang ada pada *Corporate Social Responsibility* menurut para ahli yaitu :

1. Teori *Triple Bottom Line*

Menurut Yusuf Wibisono di dalam Santioso dan Chandra (2007), menyatakan bahwa “teori *triple bottom line* adalah teori yang memberi pandangan bahwa jika sebuah perusahaan ingin mempertahankan kelangsungan hidupnya, maka perusahaan harus memperhatikan “3P” yaitu :

a. *Profit* (keuntungan)

Profit merupakan unsur terpenting yang menjadi tujuan utama dari setiap kegiatan usaha. *Profit* sendiri pada hakikatnya merupakan tambahan pendapatan yang dapat digunakan untuk menjamin kelangsungan hidup perusahaan. Aktivitas yang dapat ditempuh untuk mendongkrak *profit* antara lain dengan meningkatkan produktivitas dan melakukan efisiensi biaya.

b. *People* (masyarakat)

Masyarakat sekitar perusahaan merupakan stakeholder penting bagi perusahaan, karena dukungan masyarakat sekitar sangat diperlukan bagi keberadaan, kelangsungan hidup, dan perkembangan perusahaan, maka sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan masyarakat lingkungan, perusahaan perlu berkomitmen untuk berupaya memberikan manfaat sebesar-besarnya

kepada masyarakat.

c. *Planet* (lingkungan)

Lingkungan adalah sesuatu yang terkait dengan seluruh bidang kehidupan kita. Hubungan kita dengan lingkungan adalah hubungan sebab-akibat,

dimana jika kita merawat lingkungan maka lingkungan pun akan memberikan manfaat bagi kita.

2. Teori *Stakeholder*

Menurut Gray dkk. (2018) meyakini bahwa teori *stakeholder* merupakan salah satu kegiatan kelangsungan hidup perusahaan yang tergantung pada dukungan *stakeholder*, dan dukungan tersebut harus dicari sehingga aktivitas perusahaan adalah untuk mencari dukungan tersebut. Semakin *powerful stakeholder*, maka semakin besar usaha perusahaan untuk beradaptasi. Pengungkapan sosial dianggap sebagai bagian dari dialog antara perusahaan dengan *stakeholder*-nya.

Jadi dapat disimpulkan dalam penelitian ini, penulis meneliti dengan teori *stakeholder* karena teori *stakeholder* merupakan teori yang mempertimbangkan kepentingan kelompok yang dapat mempengaruhi strategi dan kinerja perusahaan khususnya yang ada pada PT PLN.

3. Indikator *Corporate Social Responsibility (CSR)*

Terdapat enam indikator yang ada pada *Corporate Social Responsibility* atau tanggung jawab sosial menurut *Global Reporting Initiative (GRI)* yaitu :

a. Ekonomi

Elemen ekonomi dari CSR adalah sarana perusahaan berurusan dengan masalah yang mungkin akan timbul dalam setiap interaksinya dengan pelanggan, pemasok maupun pemegang saham di pasar.

b. Lingkungan

Indikator lingkungan adalah salah satu kewajiban perusahaan terhadap dampak lingkungan yang dihasilkan dari operasi dan produk perusahaan, menghilangkan emisi dan limbah, mencapai efisiensi maksimum dan produktivitas tergantung pada sumber daya yang tersedia, penurunan praktik yang dapat berdampak negative terhadap negara dan ketersediaan sumber daya generasi berikutnya.

c. Tenaga Kerja

Tenaga kerja adalah sumber daya manusia yang terdapat di dalam perusahaan, yang akan melakukan segala aktivitas perusahaan sehingga menghasilkan barang atau

JURUSAN ADMINISTRASI BISNIS
POLITEKNIK NEGERI BALI

erat, perusahaan tidak akan berjalan baik apabila memiliki tenaga kerja yang kinerjanya kurang baik. Selain mementingkan tanggung jawab sosial terhadap pihak

eksternal, pihak internal juga perlu diperhatikan termasuk tenaga kerja.

d. Hak Asasi Manusia (HAM)

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak-hak dasar pekerja dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha dan kepentingan pengusaha. Dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan telah mengatur perlindungan terhadap hak-hak pekerja antara lain :

- 1) Hak atas upah yang layak
- 2) Hak perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, termasuk hak istirahat dan cuti.
- 3) Hak atas PHK
- 4) Hak untuk mogok kerja dan sebagainya.

Perusahaan dengan tingkat pelanggaran HAM yang sedikit akan jauh lebih baik kondisi kerjanya jika dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki tingkat pelanggaran yang besar.

e. Sosial Masyarakat

Sosial masyarakat adalah pengembangan manusia yang bertujuan untuk mengembangkan potensi dan

kemampuan manusia untuk mengontrol lingkungannya. Pengembangan masyarakat merupakan usaha membantu manusia mengubah sikapnya terhadap masyarakat, membantu menumbuhkan kemampuan untuk berorganisasi, berkomunikasi dan menguasai lingkungan fisiknya.

f. **Tanggung Jawab Produk**

Tanggung Jawab produk adalah kewajiban perusahaan terhadap produk yang dihasilkan karena produk merupakan cerminan dan output dari perusahaan, perhatian terhadap produk dapat dilakukan perusahaan dengan menjaga keamanan serta kualitas produk itu sendiri.

4. Peranan *Corporate Social Responsibility* (CSR)

Menurut Mardikanto (2018:132), peranan *Corporate Social Responsibility* terbagi menjadi 3 bagian yaitu :

1. **Bagi Masyarakat**

Dengan memperhatikan masyarakat, perusahaan dapat berkontribusi terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat. Manfaat CSR bagi masyarakat yaitu dapat mengembangkan diri dan usahanya sehingga sasaran untuk mencapai kesejahteraan tercapai.

2. Bagi Perusahaan

Perusahaan yang menerapkan CSR dengan benar akan mendapatkan dampak positif bagi keberlangsungan itu sendiri, seperti :

- a. Meningkatkan citra perusahaan
- b. Memperkuat "Brand" perusahaan
- c. Mengembangkan kerja sama dengan para pemangku kepentingan
- d. Membedakan perusahaan dengan pesaingnya
- e. Meningkatkan inovasi dan pembelajaran untuk meningkatkan pengaruh perusahaan
- f. Membuka akses untuk investasi serta pembiayaan bagi perusahaan
- g. Meningkatkan harga saham

Maka dari itu dapat disimpulkan Manfaat CSR bagi semua aspek yaitu :

- 1) Dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di berbagai aspek yang dimana perusahaan juga menjaga dan memperhatikan lingkungan yang ada di daerah perusahaan.

- 2) Dapat merasakan program CSR secara langsung baik untuk masyarakat dan perusahaan karena sama-sama menguntungkan kedua belah pihak.

5. Tujuan *Corporate Social Responsibility* (CSR)

Tujuan *Corporate Social Responsibility* bagi perusahaan terhadap tanggung jawab sosial dan lingkungan yang diatur dalam Pasal 74 UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas bertujuan untuk mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi Perseroan itu sendiri, komunitas setempat dan masyarakat pada umumnya.

C. Ekonomi Nasional

1. Situasi Ekonomi Nasional Pasca Pandemi *COVID-19*

Pandemi *COVID-19* merupakan sebuah rintangan baru bagi seluruh aspek kehidupan yang ada di dunia karena pandemi sangat menghambat seluruh aspek yang ada di dunia yang dimulai dari aspek kesehatan yang kewalahan menghadapi cepatnya sebaran virus ini, lalu aspek pendidikan yang mengalami penutupan sekolah dan kampus untuk menekan penyebaran virus, hingga aspek ekonomi yang terganggu akibat banyaknya negara menerapkan kebijakan *lockdown* untuk mengurangi penyebaran virus yang mengakibatkan juga banyaknya PHK karyawan dari perusahaan-perusahaan. Sedangkan di satu sisi perusahaan juga tetap memiliki kewajiban untuk tetap melaksanakan tanggung jawab sosial mereka, dengan adanya pandemi ini

membuat banyak perusahaan harus mengkalkulasi ulang untuk mengatur strategi mereka dalam menerapkan tanggung jawab sosial mereka.

2. Pemulihan Ekonomi Nasional

Terjadinya resesi maupun krisis ekonomi membuat pemerintah semakin optimis untuk melancarkan beberapa kebijakan baru sambil membangun kembali pondasi kerjasama untuk mencapai pemulihan yang holistik. Keberlangsungan kebijakan tersebut harus mendapat *full-support* dari pemerintah daerah sebagai komunikator ke masyarakat. Pemerintah Daerah (PEMDA) berada di posisi strategis karena memiliki pemahaman kondisi sosial masyarakat, struktur ekonomi daerah, dan demografi. Sehingga lebih leluasa mendorong efektivitas dan percepatan pemulihan ekonomi nasional.

Di sisi lain, kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat disinergikan ke masyarakat daerah.

Penanggulangan dampak krisis ekonomi yang berupa pengangguran dan kemiskinan dapat diawali dengan perencanaan strategi yang tepat untuk realisasi pembangunan. Tahapan pertama yang wajib ditetapkan ialah prioritas atas properti yang akan dibangun. Kemudian melakukan *crosscheck* atas ketersediaan sumber daya, baik

Sumber Daya Alam (SDA) maupun Sumber Daya Manusia (SDM) dan aktualisasi keadaan di lapangan.

3. Pemulihan Ekonomi Nasional Melalui Program

Perusahaan

Pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan sudah menjadi salah satu kewajiban bagi semua perusahaan, bahkan sudah melekat menjadi salah satu sistem yang perlu diperhatikan di dalam struktur manajemen perusahaan. Karena dalam sifat tanggung jawab sosial sendiri bisa di definisikan dalam berbagai tujuan, menurut Kim (2015) di dalam Setyaningrum (2017) “praktek tanggung jawab sosial perusahaan dapat diidentifikasi dalam berbagai tujuan, yakni hukum, ekonomi, moral dan filantropi. Namun demikian, tujuan tersebut masih dapat dikembangkan sesuai dengan kondisi aktual masyarakat terkait dengan tekanan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, karena salah satu sifatnya yakni filantropi ini mewakili peran sukarela, inisiatif, dan praktik yang diasumsikan oleh bisnis tetapi yang masyarakat tidak memberikan harapan yang jelas seperti dalam tanggung jawab etis. Terlepas dari sifat sukarela mereka, harapan bahwa bisnis melakukan ini masih dipegang oleh masyarakat dan harapan ini didorong oleh norma sosial”.

Dalam arti tindakan filantropi atau kedermawanan ini sangat berpengaruh juga terhadap citra perusahaan yang bisa dianggap baik oleh masyarakat sekitar, karena kepercayaan dari masyarakat sekitar terhadap sebuah perusahaan juga bisa mengangkat nama perusahaan menjadi sebuah semacam investasi jangka panjang bagi kelanjutan perusahaan.



JURUSAN ADMINISTRASI BISNIS
POLITEKNIK NEGERI BALI



BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Perusahaan

1. Sejarah Umum

Berawal di akhir abad 19, bidang pabrik gula dan pabrik ketenagalistrikan di Indonesia mulai ditingkatkan saat beberapa perusahaan asal Belanda yang bergerak di bidang pabrik gula dan pabrik teh dan memutuskan untuk mendirikan sendiri pembangkit tenaga listrik antara tahun 1942-1945 dan terjadi peralihan pengelolaan perusahaan-perusahaan Belanda tersebut oleh Jepang, setelah Belanda menyerah kepada pasukan tentara Jepang di awal Perang Dunia II.

Proses peralihan kekuasaan kembali terjadi di akhir Perang Dunia II pada Agustus 1945, saat Jepang menyerah kepada

Sekutu. Kesempatan ini dimanfaatkan oleh para pemuda dan buruh listrik melalui delegasi Buruh/Pegawai Listrik dan Gas yang bersama-sama dengan Pemimpin KNI Pusat berinisiatif menghadap Presiden Soekarno untuk menyerahkan perusahaan-perusahaan tersebut kepada Pemerintah Republik Indonesia. Pada 27 Oktober 1945, Presiden Soekarno membentuk Jawatan Listrik dan Gas di bawah Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga dengan kapasitas pembangkit tenaga listrik sebesar 157,5 MW.

Pada tanggal 1 Januari 1961, Jawatan Listrik dan Gas diubah menjadi BPU-PLN (Badan Pemimpin Umum Perusahaan Listrik Negara) yang bergerak di bidang listrik, gas dan kokas yang dibubarkan pada tanggal 1 Januari 1965. Pada saat yang sama, 2 (dua) perusahaan negara yaitu Perusahaan Listrik Negara (PLN) sebagai pengelola tenaga listrik milik negara dan Perusahaan Gas Negara (PGN) sebagai pengelola gas diresmikan

Pada tahun 1972, sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 18, status Perusahaan Listrik Negara (PLN) ditetapkan sebagai Perusahaan Umum Listrik Negara dan sebagai Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan (PKUK) dengan tugas menyediakan tenaga listrik bagi kepentingan umum. Seiring dengan kebijakan Pemerintah yang memberikan kesempatan kepada sektor

swasta untuk bergerak dalam bisnis penyediaan listrik, maka sejak tahun 1994 status PLN beralih dari Perusahaan Umum menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) dan juga sebagai PKUK dalam menyediakan listrik bagi kepentingan umum hingga sekarang.

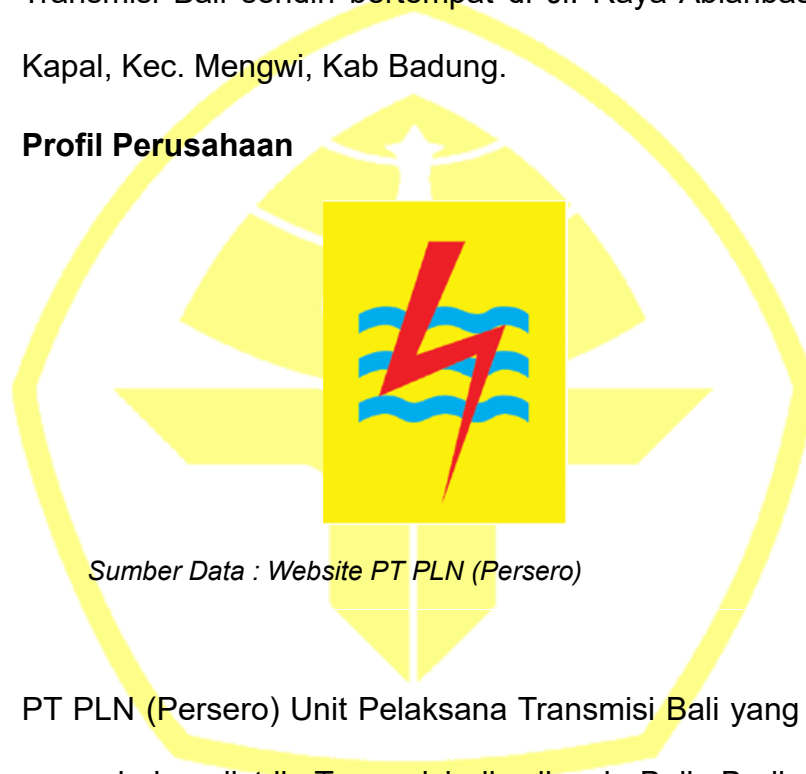
2. Sejarah Perusahaan PLN

Perusahaan Listrik Negara atau yang lebih dikenal dengan sebagai PT PLN (Persero) adalah salah satu Perusahaan BUMN (Badan Usaha Milik Negara) yang bertugas menangani aspek bidang kelistrikan di Indonesia. Sebagai Perusahaan BUMN, tugas utama PLN adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam menyediakan tenaga listrik bagi kepentingan umum untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat di seluruh Indonesia dan mendorong kegiatan ekonomi.

Dalam menjalankan Proses bisnisnya, PLN memiliki unit-unit yang tersebar di seluruh Indonesia, hingga saat ini terdapat 54 unit yang tersebar di beberapa wilayah dalam menangani bidang Pembangkitan, bidang Penyaluran (Transmisi/UIT), bidang Pengatur beban (UP2B) dan bidang Distribusi (pelayanan pelanggan/UID). Salah satu unit PLN pada bidang Tranmisi adalah PT PLN (Persero) Unit Induk Jawa Bagian Timur dan Bali atau biasa disingkat PT PLN (Persero) UIT JBM.

Dalam melaksanakan tanggung jawabnya PT PLN (Persero) UIT JBM memiliki 6 Unit Pelaksana, salah satunya yaitu PT PLN Unit Pelaksana Transmisi (UPT) Bali yang bertugas mengatur menyalurkan listrik Transmisi di seluruh wilayah Bali serta memiliki tanggung jawab yang besar terkait kelistrikan yang berada di seluruh Pulau Bali. PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Transmisi Bali sendiri bertempat di Jl. Raya Abianbase No. 3, Kapal, Kec. Mengwi, Kab Badung.

3. Profil Perusahaan



Sumber Data : Website PT PLN (Persero)

PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Transmisi Bali yang bertugas menyalurkan listrik Transmisi di wilayah Bali. Berikut alamat

lengkap:

Alamat : Jl. Raya Abianbase No. 3 , Kapal, Kec. Mengwi, Kab. Badung

Web : www.pln.co.id

Visi dan Misi :

Visi

Menjadi Perusahaan Listrik Terkemuka se-Asia Tenggara dan #1 Pilihan Pelanggan untuk Solusi Energi.

Misi

1. Menjalankan bisnis kelistrikan dan bidang lain yang terkait, berorientasi pada kepuasan pelanggan, anggota perusahaan dan pemegang saham.
2. Menjadikan tenaga listrik sebagai media untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.
3. Mengupayakan agar tenaga listrik menjadi pendorong kegiatan ekonomi.
4. Menjalankan kegiatan usaha yang berwawasan lingkungan.

4. Bidang Usaha

PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) (Persero) merupakan badan usaha yang bergerak di bidang jasa khususnya dalam bidang ketenagalistrikan di Indonesia, serta menjadi satu-satunya Perusahaan dan tulang punggung penyediaan listrik terbesar di Indonesia. Maksud dan Tujuan Perseroan untuk menyelenggarakan usaha penyediaan tenaga listrik bagi kepentingan umum dalam jumlah dan mutu yang memadai serta memupuk keuntungan dan melaksanakan penugasan Pemerintah di bidang ketenagalistrikan dalam rangka menunjang pembangunan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.

5. Struktur Organisasi dan Uraian Jabatan

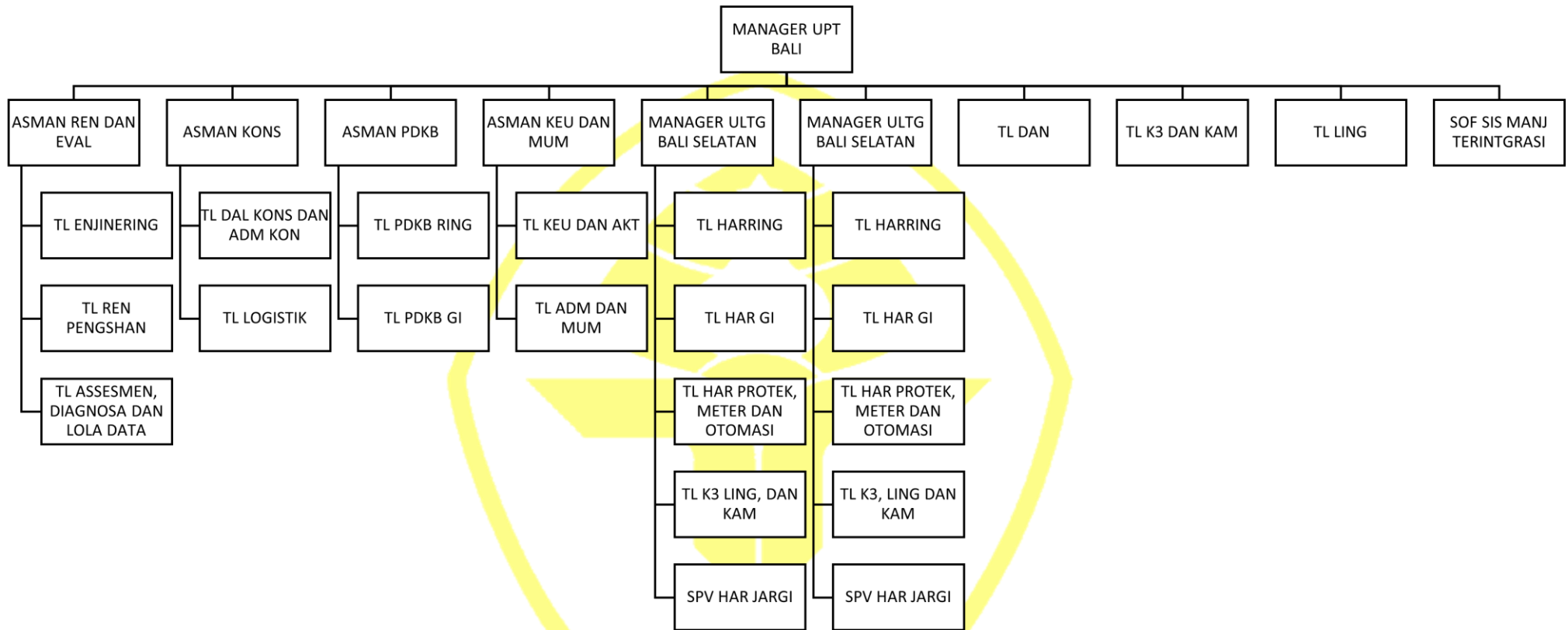
Menurut Robbins & Judge (2014:231) Struktur organisasi adalah sistem yang digunakan untuk menunjukkan bagaimana tugas pekerjaan secara formal dibagi, dikelompokkan dan dikoordinatori secara formal.

Jenis struktur dapat dibedakan menjadi 6 bagian yaitu

- a) Struktur Organisasi Fungsional
- b) Struktur Organisasi Divisional
- c) Struktur Organisasi Lini
- d) Struktur Organisasi Lini dan Staff
- e) Struktur Organisasi Matriks
- f) Struktur Organisasi Komite atau Proyek

Struktur yang ada pada PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Transmisi Bali antara lain yaitu :

JURUSAN ADMINISTRASI BISNIS
POLITEKNIK NEGERI BALI



Sumber : Data PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Transmisi Bali

JURUSAN ADMINISTRASI BISNIS
POLITEKNIK NEGERI BALI

Struktur organisasi yang ditetapkan PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Transmisi Bali merupakan struktur organisasi fungsional dengan pengelompokan pada bagian-bagian yang linear dalam satu korporat. Menurut Talcott Parsons Struktur Organisasi Fungsional merupakan jenis struktur yang ada dalam suatu perusahaan yang biasanya umum digunakan. Struktur organisasi ini dalam pembagian kerjanya dilaksanakan disesuaikan dengan fungsi yang ada pada masing-masing manajemen.

Jabatan atau kedudukan yang paling tinggi di PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Transmisi Bali adalah *Manager* yang berwenang dalam membawahi *Assistant Manager* dan *Supervisor* di setiap bagian di PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Transmisi Bali yang memiliki tugas dan kewajibannya masing-masing yaitu :

1. *Manager*

Manager bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan dan mengelola proses perencanaan pengadaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, memastikan ketersediaan dokumen produk, melakukan koordinasi dengan Pengguna Barang/Jasa, *Value for Money Committee* dan/atau pejabat

lainnya yang terkait dengan perencanaan pengadaan dan Daftar Penyedia Terseleksi.

2. *Assistant Manager/Manager* Bagian Perencanaan dan Evaluasi

Assistant Manager Bagian Perencanaan dan Evaluasi bertugas mengusulkan perencanaan dan evaluasi pengembangan instalasi penyaluran, rancangan design enjiniring, perencanaan dan evaluasi instalasi penyaluran, mengelola data perusahaan, kesiapan penyaluran untuk pencapaian target kinerja.

3. *Assistant Manager/Manager* Bagian Konstruksi

Assistant Manager Bagian Konstruksi bertanggung jawab untuk melakukan pengendalian pelaksanaan pekerjaan konstruksi untuk *uprating, re-conductoring and extention* peralatan transmisi, gardu induk dan proteksi termasuk proses perijinan dan pembebasan tanah agar pelaksanaan pekerjaan tepat biaya, mutu, waktu dan berbasis aspek K3L.

4. *Assistant Manager/Manager* Bagian Pekerjaan Dalam Keadaan Bertegangan (PDKB)

Assistant Manager Bagian PDKB bertugas untuk mengkoordinir dan mengendalikan pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan dan perbaikan instalasi penyaluran tenaga

listrik dalam keadaan bertegangan agar diperoleh keandalan dan kontinuitas operasi sistem yang optimal.

5. *Assistant Manager/Manager* Bagian Keuangan dan Umum
Assistant Manager Bagian Keuangan bertanggung jawab untuk mengelola keuangan dan administrasi Umum yang meliputi fungsi SDM, sekretariat dan dokumentasi, kehumasan, keuangan dan akuntansi, *Corporate Social Responsibility (CSR)*, fasilitas umum, dan sertifikasi tanah, untuk mendukung pencapaian kinerja organisasi.
6. *Manager* Unit Layanan Transmisi dan Gardu Induk (ULTG)
Manager ULTG bertugas untuk mengelola fungsi pemeliharaan Gardu Induk yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi hasil pemeliharaan gardu induk agar diperoleh keandalan peralatan gardu induk.
7. *Supervisor Enjinering*
Supervisor Enjinering bertugas untuk merencanakan dan evaluasi pengoperasian, pengembangan peralatan instalasi serta pendukungnya dan rancangan design enjineringnya untuk pencapaian target kinerja Unit Pelaksana.
8. *Supervisor* Pengendalian Konstruksi dan Administrasi Kontrak
Supervisor Pengendalian Konstruksi dan Administrasi Kontrak bertanggung jawab mengelola, mengendalikan dan

memastikan administrasi kontrak pekerjaan SKI di bidang Konstruksi serta mengkoordinir administrasi kontrak Pekerjaan Transmisi, Pekerjaan GI, Pekerjaan *Supply Erect*, *Supply Only* dan *Erect Only* agar sesuai dengan peraturan yang berlaku dan kesepakatan para pihak.

9. *Supervisor* Keuangan dan Akuntansi

Supervisor Keuangan dan Akuntansi bertugas untuk mengelola Sub Bidang Keuangan dan Akuntansi, meliputi fungsi keuangan dan akuntansi untuk mengetahui kinerja keuangan Unit Pelaksana.

10. *Supervisor* Perencanaan dan Pengesahan

Supervisor Perencanaan dan Pengesahan bertugas untuk bertanggung jawab mengevaluasi usulan rencana kerja anggaran unit (RKAU) berbasis risiko untuk meningkatkan kinerja unit.

11. *Supervisor* Logistik

Supervisor Logistik bertanggung jawab untuk mengelola, memonitor dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan pengelolaan logistik untuk menjaga ketersediaan material dalam rangka efisiensi dan menciptakan keandalan dalam penyaluran tenaga listrik.

12. *Supervisor* Pekerjaan Dalam Keadaan Bertegangan (PDKB)

Gardu Induk

Supervisor PDKB GI Bertanggung jawab atas pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan dan perbaikan instalasi dalam keadaan bertegangan agar diperoleh keandalan dan kontinuitas operasi sistem yang optimal.

13. *Supervisor* Administrasi dan Umum

Supervisor Administrasi dan Umum bertugas untuk mengkoordinir pengelolaan Administrasi dan Umum meliputi Administrasi SDM, pengawasan ketenagakerjaan, Kesekretariatan dan Dokumentasi, kehumasan, fasilitas dan umum serta *Corporate Social Responsibility (CSR)* untuk mendukung pencapaian sasaran kinerja Unit Pelaksana.

14. *Supervisor* Asesmen, Diagnosa dan Pengelolaan Data

Supervisor Asesmen, Diagnosa dan Pengelolaan Data bertugas untuk merekomendasi hasil diagnosa dan asesmen, mengelola data peralatan instalasi yang sesuai standar mutu yang ditetapkan.

JURUSAN ADMINISTRASI BISNIS

POLITEKNIK NEGERI BALI

15. *Supervisor* Pemeliharaan Jaringan

Supervisor Pemeliharaan Jaringan bertugas untuk mengelola fungsi pemeliharaan Jaringan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi hasil pemeliharaan jaringan agar diperoleh keandalan peralatan jaringan.

16. *Supervisor* Pemeliharaan Gardu Induk

Supervisor Pemeliharaan GI Bertugas untuk mengelola fungsi pemeliharaan Gardu Induk yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi hasil pemeliharaan gardu induk agar diperoleh keandalan peralatan gardu induk.

17. *Supervisor* Pemeliharaan Proteksi, Meter dan Otomasi

Supervisor Pemeliharaan Proteksi, Meter dan Otomasi bertugas untuk mengelola fungsi pemeliharaan Proteksi, Meter dan Otomasi yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi hasil pemeliharaan Proteksi, Meter dan Otomasi agar diperoleh keandalan peralatan Proteksi, Meter dan Otomasi.

18. Pejabat Pelaksana Keselamatan, Kesehatan Kerja, Keamanan, dan Lingkungan (K3L)

K3L bertugas untuk memantau dan mengendalikan kegiatan K3L dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku agar target kinerja K3, *zero loss*, Keamanan dan ramah lingkungan dapat tercapai.

JURUSAN ADMINISTRASI BISNIS

19. Pejabat Pelaksana Pengadaan

LAKSDA bertanggung jawab dalam mengkoordinir,

mengevaluasi dan menganalisa proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa agar pelaksanaannya dapat berjalan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku.

20. Pejabat Pelaksana K3 dan Keamanan

K3 bertanggung jawab dalam memantau, mengevaluasi dan mengendalikan kegiatan K3 dan Keamanan dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku agar target kinerja K3, *zero loss*, dan Keamanan dapat tercapai.

21. Pejabat Pelaksana Lingkungan

LING bertugas untuk mengevaluasi pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan seluruh dokumen.



JURUSAN ADMINISTRASI BISNIS
POLITEKNIK NEGERI BALI



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kebijakan Perusahaan

1. Peraturan Direksi PT PLN (Persero)

Dalam upaya untuk menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan serta meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat, PT PLN (Persero) telah menetapkan Standard Operation Procedure (SOP) untuk Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL). Kebijakan ini dituangkan dalam

Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 0135.P/DIR/2019.

Berikut adalah penjelasan lebih rinci mengenai kebijakan ini:

a. Menimbang

- 1) SOP Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan

Standard Operation Procedure (SOP) Pelaksanaan Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan (PKBL) telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 366.K/010/DIR/2007.

2) Peraturan Menteri BUMN

Dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-09/MBU/07/2005 tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara, yang telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-02/MBU/07/2017, maka perlu dilakukan penyempurnaan Keputusan Direksi sebagaimana dimaksud pada poin sebelumnya.

3) Komitmen Perusahaan

Sesuai komitmen perusahaan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) sebagai manifestasi dari budaya perusahaan, maka PT PLN (Persero) perlu berperan aktif dalam mendorong kegiatan, pertumbuhan, dan pemberdayaan ekonomi

masyarakat, terutama di sekitar wilayah operasi perusahaan atau instalasi ketenagalistrikan.

4) Keputusan Direksi

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Direksi PT PLN (Persero) tentang Standard Operation Procedure (SOP) Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL).

b. Mengingat

- 1) Undang-undang RI Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN.
- 2) Undang-undang RI Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- 3) Undang-undang RI Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.
- 4) Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 1994 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Listrik Negara menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).
- 5) Peraturan Pemerintah RI Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara.

- 6) Peraturan Pemerintah RI Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2014.
- 7) Peraturan Pemerintah RI Nomor 47 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2014.
- 8) Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-02/MBU/07/2017.
- 9) Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor SK-272/MBU/12/2014 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara.
- 10) Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor SK-211/MBU/2015 tentang Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara.
- 11) Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor SK-138/MBU/07/2017 tentang Pemberhentian,

Perubahan Nomenklatur Jabatan, Pengalihan Tugas, dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara.

12) Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara Nomor SK-169/MBU/08/2019 tentang Pemberhentian Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara.

13) Anggaran Dasar PT PLN (Persero) beserta seluruh perubahannya.

14) Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 304.K/DIR/2009 tentang Batasan Kewenangan Pengambilan Keputusan di Lingkungan PT PLN (Persero) yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 0297.P/DIR/2016.

15) Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 0051.P/DIR/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja PT PLN (Persero).

c. Memperhatikan

Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor S-882/MBU/12/2018 tanggal 13 Desember 2018 perihal Penetapan PT PNM (Persero) sebagai BUMN Khusus.

d. Memutuskan

Maka, ditetapkanlah Peraturan Direksi PT PLN (Persero) tentang Standard Operation Procedure (SOP) Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) di lingkungan PT PLN (Persero).

Dengan adanya kebijakan ini, PT PLN (Persero) berkomitmen untuk terus menjalankan program-program kemitraan dan bina lingkungan yang bermanfaat bagi masyarakat sekitar, serta memastikan operasional perusahaan berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG). Implementasi kebijakan ini diharapkan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah operasional PT PLN (Persero).

JURUSAN ADMINISTRASI BISNIS
POLITEKNIK NEGERI BALI

B. Analisis dan Interpretasi Data

Program *Corporate Social Responsibility* atau tanggung jawab sosial perusahaan yang dijalankan PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Transmisi Bali, dilaksanakan melalui Program

Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) sebagaimana diatur dalam Peraturan Direksi Nomor 0135 P./DIR/2019 tentang *Standard Operation Procedure (SOP) Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) di Lingkungan PT PLN (Persero)*. Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) merupakan amanat Kementerian BUMN sehingga setiap Badan Usaha Milik Negara (BUMN) wajib untuk memiliki PKBL. Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) yang dilaksanakan Badan Usaha Milik Negara khususnya PLN berkomitmen dalam menjalankan Program Kemitraan Bina Lingkungan dan *Corporate Social Responsibilities (PKBL & CSR)* berdasar dan berfokus pada capaian *Sustainable Development Goals (SDGs)* yang seimbang dan berkesinambungan yang sekaligus telah mengawal program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) dalam *Community, Involvement and Development (CID)*.

PLN semakin memahami pentingnya untuk memberi perhatian secara khusus terhadap isu *eviromental, social* dan *governance (ESG)* demi menjaga keberlanjutan perusahaan, lingkungan serta masyarakat dan peningkatan kesadaran tersebut hal itu sekaligus juga tercermin dari komitmen PLN. Dalam menerapkan kegiatan usaha berkelanjutan tersebut, PLN berkomitmen teguh untuk menerapkan Prinsip Bisnis

berkelanjutan dalam menjalankan kegiatan usaha yang berkelanjutan secara sosial.

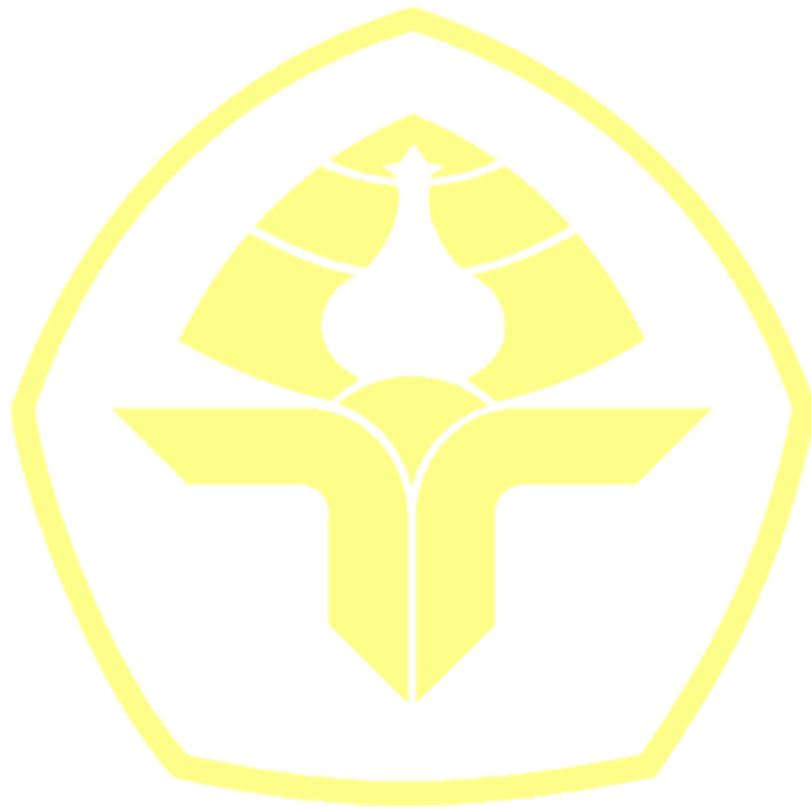
1. Tahapan Program Corporate Social Responsibility di PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Transmisi Bali

Dalam pelaksanaan program tersebut, PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Transmisi Bali telah menetapkan mekanisme penyaluran program kemitraan dan bina lingkungan yang dilakukan dengan metode penyaluran langsung oleh Pembina kepada calon penerima program dengan menerima proposal yang masuk oleh calon penerima berlandaskan dengan Tema strategis *Corporate Social Responsibility* Tahun 2023 yaitu Ekowisata. Seluruh rangkaian tahapan dan mekanisme yang dilakukan diawasi oleh Bagian Komunikasi, Keuangan dan Umum (KKU) dan Aset Properti Keuangan dan Umum (APKU) PLN Pusat.

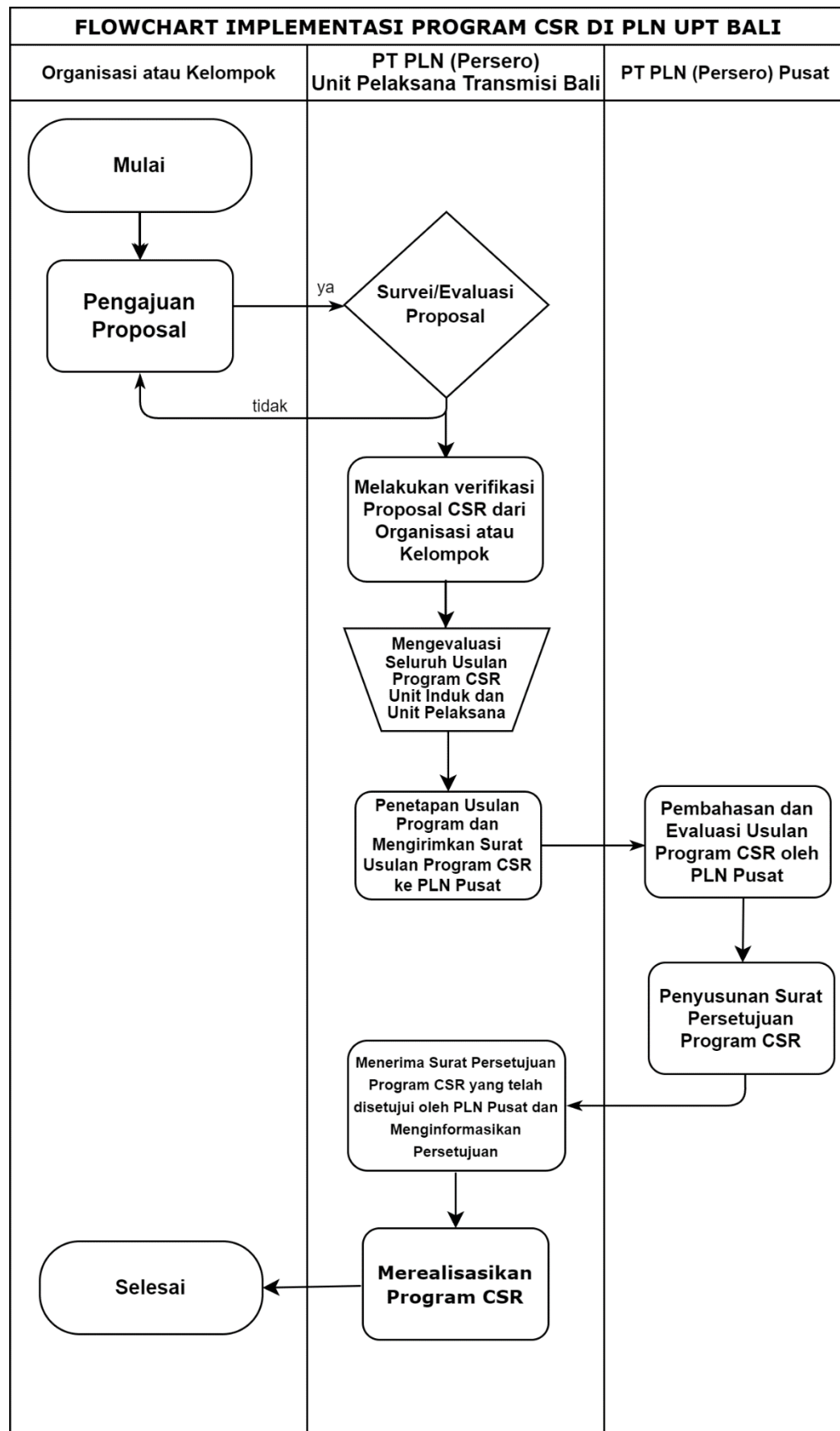
Dalam memberikan penjelasan, tahapan dan mekanisme yang jelas dan mudah dipahami, penggunaan *flowchart* adalah pendekatan yang efektif. *Flowchart* membantu visualisasi alur kerja, dapat dengan mudah mengidentifikasi potensi hambatan dan peningkatan efisiensi proses. "Kejelasan dan kesederhanaan adalah aspek terpenting dalam menyajikan data dan proses. Diagram alur (*flowchart*) dan alat visual lainnya

membantu memecah sistem yang kompleks menjadi komponen yang mudah dipahami." (Edward Tufte, 2018:110)

Sehingga dapat dijelaskan tahapan dan mekanisme dalam pelaksanaan CSR di PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Transmisi Bali dengan *flowchart*.



JURUSAN ADMINISTRASI BISNIS
POLITEKNIK NEGERI BALI



Sumber : PT PLN (Persero)

Gambar 4. 1 Flowchart Implementasi Program CSR
PT PLN (Persero) UPT Bali

Dari Flowchart diatas dapat dijelaskan tahapan dalam mengimplementasi Program CSR di PLN UPT Bali yaitu :

a. Menerima Proposal TJSL/CSR dari Organisasi/Kelompok

Proses pelaksanaan kegiatan TJSL/CSR dimulai dengan penerimaan proposal dari berbagai pihak seperti organisasi, yayasan, lembaga, komunitas, atau kelompok masyarakat. Proposal ini disusun sesuai dengan Peraturan Direksi (PERDIR), *Standard Operating Procedures* (SOP), proses bisnis, dan template yang telah ditetapkan oleh pusat atau unit terkait. Setelah proposal diajukan, dilakukan uji kelayakan dan *review* bersama dengan Divisi atau Unit Pairing untuk memastikan kesesuaian proposal dengan kriteria yang ditetapkan.

b. Survei Kelayakan Usulan Program CSR/TJSL oleh PLN Unit Pelaksana Transmisi

Proses pelaksanaan selanjutnya dilakukan survei kelayakan untuk memastikan bahwa usulan program sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Hasil dari survei ini akan digunakan sebagai dasar penilaian kelayakan penerima manfaat dari program TJSL/CSR tersebut.

c. Melakukan Verifikasi Proposal TJSL/CSR dari Kelompok oleh PLN Unit Pelaksana Transmisi

Setelah survei kelayakan, proposal akan diverifikasi sesuai dengan *score* pembobotan yang telah ditentukan. Berdasarkan

hasil verifikasi ini, disusunlah *draft* usulan program TJSL/CSR untuk satu tahun ke depan. Evaluasi usulan program dilakukan oleh Unit Induk, termasuk Unit Pelaksana Teknis (UPT). Evaluasi ini bertujuan untuk menyusun rencana kerja (*workplan*) berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan.

- d. Mengevaluasi seluruh usulan program TJSL/CSR PLN Unit Induk dan Unit Pelaksana

PLN Pusat kemudian melakukan pembahasan dan evaluasi terhadap usulan program yang diterima. Setelah disetujui, surat persetujuan program TJSL/CSR disusun dan disetujui oleh PLN Pusat. Persetujuan ini kemudian disampaikan kepada Unit Pelaksana Transmisi, dengan memastikan bahwa tidak ada pengalihan penerima program TJSL/CSR yang melebihi pagu yang telah ditetapkan.

- e. Penetapan Usulan Program TJSL ke PLN Pusat

Penetapan usulan program TJSL dilakukan berdasarkan hasil evaluasi dan rekomendasi yang telah disusun sebelumnya.

Setelah melalui tahap evaluasi, surat usulan penetapan program TJSL disiapkan dan dikirimkan ke PLN Pusat untuk proses lebih lanjut.

- f. Pembahasan dan Evaluasi Usulan Program CSR oleh PLN Pusat

Setelah menerima surat usulan penetapan program TJSL, PLN Pusat melakukan pembahasan dan evaluasi terhadap

usulan program yang diterima. Proses ini melibatkan pemeriksaan mendetail terhadap setiap usulan untuk memastikan bahwa program tersebut sesuai dengan kriteria dan tujuan TJSL/CSR yang telah ditetapkan dan sudah sesuai dengan tema strategis di tahun 2023.

g. Penyusunan Surat Persetujuan Program CSR

Berdasarkan hasil pembahasan dan evaluasi, surat persetujuan program TJSL/CSR disusun oleh PLN Pusat. Surat ini berisi detail program yang disetujui beserta alokasi anggaran dan rencana pelaksanaan. Setelah penyusunan, surat tersebut kemudian disetujui secara resmi oleh PLN Pusat.

h. Menerima Surat Persetujuan Program CSR yang telah disetujui oleh PLN pusat dan Menginformasikan Persetujuan

Surat persetujuan program TJSL/CSR yang telah disetujui oleh PLN Pusat diterima dan di dokumentasikan untuk proses selanjutnya dan dilanjutkan dengan menginformasikan bahwa Program CSR yang diusulkan sudah disetujui.

i. Merealisasikan Program CSR

Setelah mendapatkan persetujuan resmi dari PLN Pusat, informasi mengenai persetujuan program TJSL/CSR disampaikan kepada Unit Pelaksana Transmisi (UPT). UPT kemudian bertanggung jawab untuk memastikan bahwa tidak ada pengalihan penerima program TJSL/CSR yang melebihi

pagu anggaran yang telah ditetapkan. Dengan demikian, pelaksanaan program TJSL/CSR dapat berjalan sesuai rencana dan mencapai sasaran yang diinginkan tanpa terjadi penyimpangan anggaran, sehingga realisasi Program CSR bisa terlaksana dengan baik.

2. Implementasi Program *Corporate Social Responsibility* (CSR) Pada PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Transmisi Bali Sebagai Upaya Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi COVID-19 di Desa Wanagiri.

Desa Wanagiri yang diwakili oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Eka Giri Karya Utama merupakan badan usaha yang mengembangkan potensi wisata yang ada di Desa Wanagiri bertempat di Banjar Dinas Asah Panji, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng. BUMDES Wanagiri mengusulkan Proposal kepada PLN UPT Bali dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan menambahnya varian wisata yang nantinya dapat menunjang peningkatan ekonomi dan pariwisata di Bali Utara pasca Pandemi COVID-19. Melihat adanya potensi wisata, PLN UPT Bali mengevaluasi dan akhirnya memanfaatkan lahan milik Dinas Kehutanan sehingga diusulkan Program Pariwisata dengan membuat Program pengembangan *Bike Park* di Hutan Desa Wanagiri untuk percepatan pemulihan ekonomi dan pariwisata Bali Utara. Melihat adanya potensi yang

tinggi Program CSR dari PLN diharapkan mampu meningkatkan jumlah pengunjung wisata ke Desa Wanagiri sebagai salah satu pemulihan ekonomi pasca Pandemi COVID-19, sehingga dengan adanya program ini juga dapat menjaga kelestarian flora dan fauna pada wilayah hutan sesuai dengan program yang dimiliki oleh PLN pada tahun 2023 yaitu Ekowisata.

Implementasi Program CSR PLN UPT Bali di Desa Wanagiri direalisasikan pada Bulan Mei 2023, sekaligus program ini bekerja sama dengan Dinas Kehutanan dan PLN (Persero) Pusat. Adapun tahapan yang dilakukan dalam melaksanakan Implementasi Program CSR sebagai pemulihan ekonomi di Desa Wanagiri adalah sebagai berikut :

- a. Pengajuan Proposal dari Desa Wanagiri kepada PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Transmisi Bali

Desa Wanagiri yang diwakili oleh BUMDES Eka Giri Karya Utama mengajukan permohonan proposal kepada PT PLN (Persero) UPT Bali pada tanggal 29 Desember 2022 dengan judul “Pengembangan *Bike Park* di Hutan Desa Wanagiri untuk Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Pariwisata Bali Utara” dengan jenis usulan “Desa Binaan Dana CSR PLN”. Kemudian proposal dibaca dan di cek kembali mengenai jenis proposal apa yang diajukan oleh Desa Wanagiri.

- b. PT PLN (Persero) UPT Bali melakukan survei kelayakan Program Usulan yang diajukan Desa Wanagiri

Setelah Desa Wanagiri mengajukan proposal ke PT PLN (Persero) UPT Bali, proposal akan di survei dan di evaluasi serta dilakukan uji kelayakan apakah Desa Wanagiri berhak mendapatkan Program CSR atau tidak, dan pada akhirnya diputuskan bahwa Desa Wanagiri berhak mendapatkan Program CSR PLN UPT Bali karena sesuai dengan tema strategis PLN Tahun 2023 yaitu Ekowisata, PLN UPT Bali melakukan penilaian dengan formulir evaluasi penilaian kelayakan Program CSR berdasarkan poin penting dari kriteria yang berisi manfaat, jenis program, jumlah penerima dan poin penting lainnya.

JURUSAN ADMINISTRASI BISNIS
POLITEKNIK NEGERI BALI

**EVALUASI PENILAIAN KELAYAKAN PROGRAM CSR
SUMBER PROPOSAL EKSTERNAL**

Asal Proposal : Br. Dinas Yeh Ketipat, Desa Wanagiri, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng
Nama Program : Pengembangan Bike Park di Hutan Desa Wanagiri untuk Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Pariwisata Bali Utara

NO	URAIAN KRITERIA	Nilai					NILAI EVALUATOR	NILAI VERIFIKATOR
		0	5	10	15	20		
1	Ada Disposisi Direksi	tidak				iya / ada	0	
2	Rekomendasi dari Stakeholder Utama	tidak ada 1 pun karakteristik yang terpenuhi, baik legitimasi, kekuasaan maupun urgensi		1, salah satu karakter terpenuhi yaitu legitimasi atau kekuasaan atau urgensi 2. Rekomendasi pegawai PLN (.....)	Beririsan 2 diantara 3 karakteristik	Stakeholder yang memiliki legitimasi, kekuasaan, urgensi	20	20
3	Lokasi penerima manfaat ring 1	tidak		ring 3	ring 2	ring 1	20	20
NO	URAIAN KRITERIA	1	3	5	7	10		
4	Sumber/ asal proposal	Perseorangan	pihak ke2/ yayasan/ proposal umum yang belum diketahui reputasinya	pihak ke2 yang mempunyai reputasi / nama baik bergerak di bidang sosial namun hanya sebagai penghubung (biaya operasional relatif besar)	pihak ke2 yang mempunyai reputasi / nama baik di bidang sosial (relawan) = biaya operasional relatif rendah	1. komunitas internal pegawai dengan branding PLN atau ; 2. pihak ke2 yang mempunyai reputasi / nama baik di bidang sosial (relawan) = biaya operasional relatif rendah branding tunggal PLN	7	7
5	Manfaat buat PLN secara langsung	hanya diumumkan mendapat bantuan PLN	memberikan logo sebagai bukti bantuan PLN	mendukung program ketenagalistrikan	Program yang inovatif, identik/ berkarakter PLN, manfaat untuk PLN jangka panjang	bermanfaat kinerja/ KPI/ kelancaran operasional perusahaan	10	10
6	Jenis Program	chrity/ donasi/ sukarela	bantuan fisik pendidikan, tempat ibadah, fasum fasos	bantuan kesehatan, bantuan pendidikan formal,	pelatihan non formal,	bantuan pemberdayaan pelestarian lingkungan, pemberdayaan komunitas, sinergi program, pengentasan kemiskinan pemberdayaan ekonomi	10	10
7	Jumlah penerima manfaat langsung (banyak/ sedikit)	perseorangan	<10	10-50	50-100	>100	10	10
8	Program di dilengkapi dengan exit strategy/ kemandirian/ tidak bergantung pada PLN (manfaat untuk komunitas)	tanpa pelatihan	dilakukan pelatihan teknis	dilakukan pelatihan teknis dan manajemen pengelolaan	dilakukan pelatihan teknis, manajemen dan pemasaran	semua tahapan sebelumnya dan sinergi dengan institusi terkait untuk keberlangsungan program	1	1
9	Potensi materi layak Publikasi media	spanduk	spanduk, seragam	brand PLN, news media lokal	brand PLN, advetorial media nasional	branding tunggal PLN, media lokal, news nasional	1	1
HASIL EVALUASI EKSTERNAL							79	78

Buleleng, 2023

Evaluator **EKO HARIYANTO**

Verifikator (Manager) **LUKY HANDIANTO ADI P**

Perlu Pertimbangan Tindakan/jut Atasan (VP CSR) :

Ya (lanjut)	Tidak
-------------	-------

cek list if sesuai pilihan kriteria kelayakan

Nilai bobot	Kelayakan	Keterangan tambahan	cek list	Koreksi
< 50	tidak layak			
50 - 60	Perlu Pertimbangan			
>61	Layak			

cek list if sesuai pilihan kriteria kelayakan

ttt VP CSR :

Catatan tambahan pertimbangan tindakan/jut Atasan :

Sumber : Arsip Data PT PLN (Persero) UPT Bali

c. Melakukan Risalah Hasil Survei

PT PLN UPT Bali bekerja sama dengan Dinas Kehutanan untuk menghitung dan membagi wilayah pada hutan yang ada di Desa Wanagiri yang akan digunakan untuk jalur lintas utama Sepeda Listrik dan *All Terrain Vehicle* (ATV). Kegiatan survei risalah dilakukan dengan proses pengumpulan, pencatatan dan analisis data yang berkaitan dengan jalur di hutan tersebut untuk memperjelas kepemilikan aset bantuan program. Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan, Risalah Hutan merupakan kegiatan pengukuran, pengamatan dan pencatatan terhadap pohon yang direncanakan akan ditebak yang dilaksanakan dengan intensitas sebesar 5%.

Selain untuk memperjelas kepemilikan aset hutan, Survei Risalah juga dilakukan untuk mengukur dan menghitung jarak *tracking Bike Park* sehingga jika jalan tertutup oleh pohon maka pohon yang ada di hutan tersebut akan ditebang. Proses ini memerlukan keahlian dalam identifikasi tumbuhan, pengukuran lapangan dan pemahaman yang baik tentang ekologi hutan dan metode survei.

RISALAH HASIL SURVEY
RENCANA PROGRAM PT PLN (PERSERO)

1	Nama Program	:	Pengembangan Bike Park di Hutan Desa Wanagiri untuk Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Pariwisata Bali Utara
	Jenis bantuan	:	Bantuan Fisik / Non Fisik
2	Lokasi Kegiatan	:	Br. Dinas Yeh Ketipat, Desa Wanagiri, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, Bali
3	Tanggal Survey	:	02 - 05 - 2023
4	Jarak dari PLN terdekat	:	7 KM
5	Bantuan Non Fisik	:	
6	Kepemilikan aset bantuan Bantuan Fisik	:	<ul style="list-style-type: none"> a. di tanah Pribadi b. lahan hibah c. kepemilikan masy atau komunitas d. tanah Sengketa e. lainnya <u>Milik Desa Kehutanan</u>(sebutkan)
7	Keberlanjutan bantuan	:	<ul style="list-style-type: none"> a. dikelola Pribadi b. dikelola masy atau komunitas c. lainnya(sebutkan)
8	Sumber dana bantuan untuk program ini adalah	:	<ul style="list-style-type: none"> a. donatur dari beberapa institusi BUMN/ pemerintah b. dari PLN 100% c. ada kontribusi masyarakat d. lainnya(sebutkan)
9	Potensi pengembangan program untuk Citra PLN	:	<ul style="list-style-type: none"> a. kesediaan dibangun papan nama "BANTUAN PLN" b. kesediaan memberikan nama program yang memberikan karakter PLN c. lainnya(sebutkan)
10	Manfaat untuk Masyarakat/ komunitas	:	<ul style="list-style-type: none"> 1. Terciptanya Sarana dan Prasarana Masyarakat untuk meningkatkan kegiatan social masyarakat sekitar instalasi 2. Masyarakat paham terhadap proses pengelolaan ketenagalistrikan

Sumber : Arsip Data PT PLN (Persero) UPT Bali

- d. Menerima Surat Pernyataan Komitmen Bantuan Dana dari PT PLN (Persero) Sebagai Bentuk Realisasi Program CSR Desa Wanagiri

PT PLN UPT Bali memberikan Surat Pernyataan Komitmen Bantuan Dana sebagai salah satu bentuk bahwa Program CSR akan segera direalisasikan di Desa Wanagiri. PT PLN UPT Bali mengadakan Rapat Survei Lanjutan dan Koordinasi Penyerahan Bantuan yang bertempat di Kantor Balai Desa Wanagiri, selain melakukan agenda rapat PT PLN UPT Bali menyerahkan bantuan dana yang telah diberikan PLN Pusat senilai Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dengan kewajiban untuk merealisasikan program dengan penuh tanggung jawab atas kebenaran dan kewajaran serta dapat membantu mensosialisasikan program PT PLN (Persero) kepada masyarakat dengan pemakaian listrik yang SAH (tidak mencuri), membantu mengamankan aset PT PLN (Persero) di lingkungan terdekat dan melakukan kampanye akan kesadaran penggunaan listrik yang baik dan benar.

JURUSAN ADMINISTRASI BISNIS
POLITEKNIK NEGERI BALI

**SURAT PERNYATAAN
KOMITMEN BANTUAN DANA
PT PLN (PERSERO)**

Kami yang bertandatangan dibawah ini, menyatakan bahwa :

Nama : I Made Darsana

**Perwakilan dari (Yayasan/
Komunitas/NGO/dll)** : BUMDes Eka Giri Karya Utama

Alamat : Br. Dinas Yeh Ketipat, Desa Wanagiri, Kecamatan Sukasada,
Kabupaten Buleleng, Bali.

No Telp : 0821-4655-1834

Telah menerima bantuan dari PT PLN (Persero), berupa : Barang/Uang *), senilai Rp. 200.000.000,00
Terbilang : (Dua Ratus Juta Rupiah).

Untuk Bantuan :

Biaya Pengembangan Wisata Bike Park di Hutan Wisata Wanagiri untuk BUMDes Eka Giri Karya Utama.

Tindaklanjut dari bantuan tersebut kami berkewajiban untuk :

1. Merealisasikan program dengan penuh tanggung jawab atas kebenaran dan kewajaran kegiatan termasuk harga satuan, volume (kuantitas) dan kualitas pekerjaan serta kesesuaian antara usulan proposal dengan realisasi bantuan.
2. Melaporkan bukti realisasi bantuan paling lambat 1 (satu) bulan setelah bantuan diterima. Dilengkapi dengan foto dokumentasi dan beberapa pernyataan penerima manfaat.
3. Menyerahkan dan/atau memanfaatkan sepenuhnya untuk kebutuhan kegiatan tersebut.
4. Membantu mensosialisasikan program PT PLN (Persero) kepada masyarakat yaitu :
 - a. Pemakaian listrik yang SAH (tidak mencuri)
 - b. Membantu mengamankan asset PT PLN (Persero) di lingkungan terdekat
 - c. Kampanye kesadaran penggunaan listrik yang baik dan benar

Surat pernyataan komitmen ini Kami buat dengan kondisi yang sebenarnya dan akan Kami laksanakan dengan penuh tanggung jawab.



Keterangan :

- Mohon di tandatangani, bermaterai, stempel
- *) coret salah satu

e. Merealisasikan Seluruh Rangkaian dan Kelengkapan Program CSR di Desa Wanagiri

Setelah seluruh tahapan dan proses dari administrasi dan verifikasi dijalankan, PT PLN UPT Bali menyerahkan sepenuhnya kepada Desa Wanagiri atas segala keperluan dan kebutuhan yang harus disiapkan sebelum Pengembangan Wisata *Bike Park* dibuka untuk umum. Bersama BUMDES Wanagiri yang diwakili oleh Bapak I Made Darsana. Dalam menyiapkan segala keperluannya dana yang diberikan oleh PT PLN UPT Bali kepada Desa Wanagiri digunakan untuk keperluan :

- a. Pengadaan *ATV Sport*
- b. Pengadaan Sepeda Listrik
- c. Gudang untuk simpan *ATV*
- d. Membuat Pos Informasi
- e. Survei Lokasi *Trail*
- f. *Grand Opening*

JURUSAN ADMINISTRASI BISNIS
POLITEKNIK NEGERI BALI



Sumber : Dokumentasi TJSL UPT Bali

Dalam melaksanakan pengimplementasiannya, Desa Wanagiri telah berhasil menciptakan Daerah Wisata yang bisa dikunjungi oleh pengunjung domestik maupun *non-domestik* untuk bisa merasakan keindahan alam yang ada di sekitar Desa Wanagiri. Sehingga dengan adanya Program CSR ini, peningkatan ekonomi perlahan pulih karena bantuan dari PT PLN (Persero) Pusat dan PT PLN UPT Bali.

3. Hambatan dan solusi yang dirasakan PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Transmisi Bali Dalam Upaya Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi COVID-19 Di Desa Wanagiri

Suatu kegiatan maupun pelaksanaan Program CSR oleh PT PLN UPT Bali ini tidak luput dari hambatan yang dirasakan oleh para pelaksana maupun penerima yang pada akhirnya juga mendapatkan solusi dari segala hambatan yang dialami. Adapun hambatan yang dirasakan selama melakukan kegiatan Program CSR di Desa Wanagiri dibagi menjadi 2 yaitu :

a. PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Transmisi Bali

- 1) Jarak antara Perusahaan dengan Desa sangat jauh, sehingga sulit untuk melakukan koordinasi.
- 2) Verifikasi dari PLN Pusat yang cukup memakan waktu sehingga PLN UPT Bali belum bisa menggerakkan program bantuannya.
- 3) PLN UPT Bali tidak bisa mengawasi segala transaksi dan aktivitas keuangan dari dana yang diberikan kepada Desa Wanagiri.

b. Desa Wanagiri

- 1) Mengalami kesulitan dalam penulisan proposal karena tidak ada draft yang bisa digunakan untuk diajukan ke PLN Pusat

- 2) Dana yang diberikan masih belum memenuhi kebutuhan dan perlengkapan yang mendukung.

Dengan adanya hambatan yang dirasakan terdapat solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut, yaitu :

a. PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Transmisi Bali

- 1) Menetapkan Pos Gardu Induk Pemaron sebagai jarak terdekat antara Desa dan PLN untuk melakukan tempat koordinasi pelaksanaan Program CSR UPT Bali.
- 2) Mengirimkan surat pengajuan verifikasi proposal yang dikirim oleh Desa Wanagiri dan diperhatikan secara berkala.
- 3) Melakukan pembukuan dan pencatatan segala transaksi dan aktivitas keuangan untuk dimasukkan ke dalam Laporan Pertanggung jawaban Program CSR UPT Bali

b. Desa Wanagiri

- 1) Mengajak instansi pendidikan yaitu Universitas Pendidikan Ganesha untuk membantu dalam membuat pengajuan proposal ke PT PLN (Persero) agar sesuai dengan kaidah, tata bahasa dan tujuannya.

- 2) Melaksanakan kegiatan Desa Wisata *Bike Park* yang baik dengan meningkatkan fasilitas yang diberikan PLN seperti sepeda listrik, ATV, lampu jalan dan lain-lain sebagai salah satu kunci untuk meningkatkan pendapatan yang ada di Desa Wanagiri agar lebih giat dalam mempromosikan Desa Wisata yang ada di Desa Wanagiri.



JURUSAN ADMINISTRASI BISNIS
POLITEKNIK NEGERI BALI

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai Implementasi Program *Corporate Social Responsibility* (CSR) oleh PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Transmisi Bali Sebagai Upaya Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi *COVID-19*, dapat disimpulkan bahwa :

1. Implementasi Program CSR yang diimplementasikan oleh PT PLN (Persero) telah memberikan kontribusi positif untuk pemulihan ekonomi masyarakat sekitar Desa Wanagiri dengan nama program Pengembangan *Bike Park* di Hutan Desa Wanagiri dengan memberikan dana untuk penyediaan sepeda listrik, ATV dan lampu jalan yang pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan di Desa tersebut.

2. Keberhasilan Program CSR PLN UPT Bali tidak lepas dari partisipatif aktif masyarakat yang membantu dalam penyusunan proposal ke PT PLN (Persero) Pusat.
3. Dampak Program CSR PLN UPT Bali ini meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mendorong promosi Desa Wisata serta terciptanya sarana dan prasarana seperti listrik sehingga masyarakat paham terhadap proses pengelolaan ketenagalistrikan.

B. Saran

1. Perlu adanya peningkatan lebih lanjut terhadap fasilitas dan infrastruktur yang telah disediakan untuk mendukung kegiatan wisata seperti penambahan sepeda listrik dan perbaikan jalur lintas sepeda.
2. Mengadakan pelatihan dan edukasi bagi masyarakat lokal mengenai pengelolaan usaha wisata dan keterampilan lain yang relevan untuk mendukung ekonomi Desa.
3. Meningkatkan *monitoring* dan *evaluasi* berkala terhadap pelaksanaan Program CSR untuk memastikan bahwa program tersebut berjalan sesuai rencana dan memberikan dampak untuk kedua belah pihak.

DAFTAR PUSTAKA

Danang, Sunyoto. 2018. *Journal Objek dan Metode Penelitian. Data Primer dan Data Sekunder*, Cited by 68. Jakarta.

Gray, et al 2011. Pengertian Stakeholder terhadap Perusahaan. Cited by 112-148.

Global Reporting Initiative. 2018, Indikator CSR menurut *Global Reporting Initiative*.

Indonesia. 2009, Menteri Kehutanan Republik. *Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia*. <https://jdih.menlhk.go.id/>

Mardikanto, 2018. "*Corporate Social Responsibility*." 11-12. "*Corporate Social Responsibility* adalah sebuah konsep"

Mardikanto, T. and Budhi, S., 2013. *CSR (Corporate Social Responsibility)*. Bandung: Alfabeta.

Mulyadi, 2022. Pengertian Implementasi "suatu tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan. repository.uma.ac.id/ 11-14".

Otoritas Jasa Keuangan. 2007. "UU-40-2007 PERSEROAN TERBATAS." ojk.go.id/. www.ojk.go.id/sustainable-finance/id/peraturan/undang-undang/

PT PLN (Persero). 2018. "*Corporate Social Responsibility*." <https://web.pln.co.id/sustainability/corporate-social-responsibility-csr>.

Purwanto (Syahida). 2014. "Faktor-faktor yang menentukan berhasil atau tidaknya suatu proses Implementasi". *Kemdikbud article*.

Prasetyo dan Meiranto 2017. "CSR merupakan suatu konsep" Tahun 2023.
cited by 179

Rosidah, 2018. *Corporate Social Responsibility* 33-34. "Corporate Social Responsibility atau tanggung jawab sosial adalah suatu konsep untuk perusahaan yang memiliki berbagai tanggung jawab terhadap seluruh pemangku kepentingannya"

Sekaran dan Bougie. 2017. "Kuesioner adalah daftar pertanyaan tertulis". Jakarta, *Cited by 7. Pengertian Kuesioner*

Setiawan, 2022. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, (Jakarta), hal 70. Pengertian Implementasi

Sugiyono, 2017. "Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data". *Journal. Cited by 802*

Sugiyono, 2017. "Sumber Data Primer, Teknik Pengumpulan Data Menurut Sugiyono." *Journal. Cited by 700, Jakarta.*

Sugiyono, 2018. "Pengertian Data Kualitatif dan Kuantitatif Menurut Sugiyono." *Journal. Cited by 608, Jakarta*

Sugiyono, 2017. "Observasi sebagai teknik pengumpulan data yang mempunyai ciri spesifik. Menurut Sugiyono" *Journal. Cited by 45*

Sugiyono. 2020. "Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data" *Journal. Cited by 3*

Otoritas Jasa Keuangan. 2007. "UU-50-2007 PERSEROAN TERBATAS." *ojk.go.id/. www.ojk.go.id/sustainable-finance/id/peraturan/undang-undang*